

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembahasan internasional mengenai krisis lingkungan secara kuat dibahas ketika konferensi Lingkungan di Stockkolm Swedia pada tahun 1972 (Satnyoto, 2017). Ini memberikan pandangan bahwa dalam krisis lingkungan hidup adanya kepedulian antar negara bangsa dimana peran lintas sektor seperti aktor negara dan non negara memiliki keterlibatan penting dalam kelestarian lingkungan hidup pada skala internasional. Dalam tatanan global, isu ini didasari adanya Sentralisasi pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan degradasi dalam kualitas pembangunan lingkungan hidup dan menumbuhkan masalah krisis lingkungan yang mengancam kehidupan di era modern (Yulia Hartati, 2012). Isu lingkungan hidup kemudian memunculkan perdebatan baru dalam kajian hubungan internasional tentang keseimbangan antara manusia dengan kelestarian lingkungan.

Masuknya isu lingkungan hidup kedalam perhatian global dilandasi oleh beberapa faktor (Yulia Hartati, 2012). Pertama, permasalahan lingkungan hidup berdampak kedalam skala global. Kedua, permasalahan ekologi bersinggungan dengan praktik eksploitasi secara berlebihan. Ketiga, isu lingkungan bersifat transnasional yang artinya ketika ada permasalahan lingkungan pada satu negara, dampaknya terasa hingga kenegara lain, contohnya dampak asap kebakaran hutan. Keempat, adanya degradasi lingkungan pada skala lokal dan nasional. Kelima, proses eksploitasi lingkungan mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi suatu wilayah yang notabenebagian dari ekonomi politik global.

Isu perubahan iklim atau dikenal dengan *climate of change* merupakan permasalahan yang krusial dalam tatanan global pada permasalahan lingkungan hidup. Secara harfiah perubahan iklim terjadi karena adanya pergeseran seperti suhu, cuaca, curah hujan, bahkan arah gerak angin. Secara artian khusus perubahan iklim dapat diartikan sebagai bentuk pemanasan global karena adanya kenaikan suhu bumi secara signifikan (Hapsari, 2012). Selama satu abad terakhir, suhu bumi mengalami peningkatan sebesar 0,8 derajat celsius sebagaimana yang dipaparkan pada kajian ke 5 *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* yaitu sebuah lembaga antar pemerintah mengenai perubahan iklim (Adi Budiarmo, 2019).

Wilayah provinsi Kepulauan Riau sangat rentan akibat dampak dari perubahan iklim. Dengan kontur wilayah yang dominannya dikelilingi lautan yaitu sebesar 242.825 km² atau sebesar 96 % tentunya akan berdampak serius akibat fenomena tersebut terkhususnya masyarakat yang hidup pada wilayah pesisir (Dinas Kesehatan Prov. Kepri, n.d.). Dampak dari perubahan iklim pada wilayah Kepri yang disampaikan Wakil Pusat Penelitian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PPSPL) UMRAH bapak Wahyudin pada kajian dampak perubahan iklim bersama jurnalis terlihat dengan adanya beberapa fenomena yaitu pada kawasan pesisir terjadinya kenaikan air laut dan gelombang yang tinggi sehingga dengan mudah menyebabkan abrasi pada pesisir pantai dan pulau pulau kecil (Saptiyulda, 2023a). Penanganan pada permasalahan iklim perlu ditangani secara bersama dengan melibatkan segala elemen masyarakat, pemerintah, NGO, dan tidak terkecuali dimulai dari masing-masing individu.

Aktor non negara memainkan peran yang penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Aktor non negara sebagai sebuah lembaga mampu berorientasi ditengah polemik yang ada pada kehidupan sosial masyarakat (Auliarini, 2016). Sebagai lembaga yang tidak ada keterikatan atas pemerintah secara struktural, aktor non negara dengan mudah bersosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kompleknya hubungan internasional menciptakan peran aktor non- negara secara leluasa mengambil andil pada tatanan global hingga pada ruang lingkup yang lebih rendah.

Permasalahan iklim tentunya menjadi perhatian bersama tidak terkecuali NGO. Permasalahan iklim yang disebut sebagai pemanasan global beralih era menjadi pendidihan global sebagaimana yang disampai Sekjend PBB Antonio Guterres (CNN, 2023). Dengan adanya statemen seperti ini tentu memberikan gambaran yang buruk mengenai krisis iklim yang melanda kehidupan global. Percepatan Krisis iklim ini harus diminimalisir dengan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dengan komitmen bersama untuk satu tujuan bumi dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan begitu, segala aspek pembangunan yang ada diseluruh dunia hendaknya berasaskan berkelanjutan dan khususnya memerhatikan isu perubahan Iklim serta penanganannya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau yang disingkat SDGs hadir ditengah berbagai macam polemik sebagai suatu kesepakatan yang dicapai bersama dalam upaya pembangunan dengan komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdampingan dengan tetap memperhatikan isu sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup (Puspito et al., 2021).

SDGs disepakati dalam forum PBB sebanyak 193 negara salah satunya Indonesia pada tanggal 25 September 2015 dengan jumlah tujuan sebanyak 17 tujuan pembangunan. Agenda SDGs merupakan turunan dari konsep sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*). Dengan adanya beberapa program yang masih belum maksimal dari MDGs, maka penyempurnaannya dilanjutkan pada agenda SDGs dengan capaian ditahun 2030. Adapun agenda SDGs memuat beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut (sdgs.bappenas.go.id, n.d.) :

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan terkhusus pada penangana krisis iklim, maka diperlukan kerjasama antar aktor baik negara maupun aktor non-negara. Permasalahan iklim menjadi suatu isu yang kompleks dan pastinya akan memberikan beberapa dampak baik dari aspek sosial dan tentunya aspek ekologis. SDGs sebagai acuan global dalam bergerak menangani permasalahan iklim yang sebagaimana termuat dalam SDGs point 13 adalah dasar

bergerak dalam kasus krisis iklim tersebut. Dengan adanya goals 13 tersebut maka perlunya sebuah perubahan untuk mencapai tujuan tersebut dengan target sebagai berikut (Bappenas, n.d.):

1. Meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana alam serta permasalahan iklim pada setiap negara
2. Mengintegrasikan langkah-langkah prakiraan permasalahan iklim kedalam rencana pembangunan nasional
3. Peningkatan terhadap kapasitas SDM dan lembaga agar tercipta pendidikan yang berkualitas, kesadaran, adaptasi dan mitigasi, serta meminimalisir resiko atau dampak dari perubahan iklim.
4. Memenuhi komitmen negara-negara majun terhadap Konvensi Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, dengan tujuan memobilisasi sumber daya bersama sebesar US\$ 100 miliar pertahun dari berbagai sumber yang dimulai di tahun 2020 untuk mendukung negara-negara berkembang dengan memastikan *Green Climate Fund* beroperasi penuh dalam impelementasi langkah-langkah mitigasi setepat mungkin.
5. Mempromosikan instrumen-instrumen untuk menguatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kategori kepulauan kecil yang juga terkonsen pada perempuan, pemuda, serta komunitas lokal yang terpinggirkan.

Dampak perubahan iklim memberikan efek yang serius dengan masyarakat sebagai korbannya. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan

perubahan iklim merupakan suatu keharusan yang dimulai dari diri masing-masing. Keane dalam tulisan Khairur Rijal dan Anggraheni menyebutkan kelompok-kelompok masyarakat sipil sebagai kajian ilmu hubungan internasional dengan definisi bahwa adanya ruang sosial, organisasi, gerakan dan kelompok, serta entitas yang saling terhubung yang mana aktornya melebihi dari satu pihak, bahkan sifatnya lintas batas negara tetapi mampu menghubungkan dimensi global ke lokal atau sebaliknya (Rijal & Anggraheni, 2019). Oleh karena itu isu perubahan iklim merupakan isu yang komprehensif dan multidisipliner, sehingga untuk mencapai tujuan diperlukan partisipasi dari berbagai pihak. Kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan aktor non negara menyadarkan betapa pentingnya isu perubahan iklim ditengah masyarakat (Harison, 2010)

Carbonethics merupakan suatu lembaga yang bertujuan memulihkan keseimbangan iklim melalui solusi Iklim alami dengan pionir dalam konservasi karbon biru (CarbonEthics, 2023). Sebagai lembaga yang bergerak dibidang lingkungan, Carbonethics juga membantu meningkatkan *impact social* dengan menumbuhkan kehidupan mitra masyarakat lokal serta keanekaragaman hayati. Secara idea, peran yang dimainkan Carbonethics memiliki kemiripan secara tindakan dan pemikiran Green Theory yang memandang adanya degradasi pada lingkungan sehingga perlunya pengambilan tindakan baik dalam upaya pemulihan, adaptasi, ataupun mitigasi. Ini menjadi suatu pandangan bahwa Carbonethics memiliki relevansi dengan peranannya dalam mengadopsi beberapa kebijakan global yang berkaitan dengan penanganan iklim salah satunya *Sustainable Development Goals* SDGs terkhusus point ke 13.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis peneliti, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana peran carbonethics dalam implementasi *sdgs 13* di provinsi kepulauan riau periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran carbonethics dalam implementasi *sdgs 13* di provinsi kepulauan riau periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca dan peneliti tentang bagaimana peran carbonethics dalam implementasi *sdgs 13* di Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2023. Kemudian, Penelitian ini juga bermanfaat sebagai kajian studi Ilmu Hubungan Internasional dalam menganalisis peran carbonethics dengan analisa perpektif *green theory* dalam penanganan krisis iklim di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai korelasi antara aktor non negara dengan pemamahan akan pemikiran *green theory*. Selain itu penelitian ini juga menambah informasi pembaca tentang bentuk penanganan krisis Iklim yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan aktor non-negara.